



## **RELATION HORIZONTAL DAN VERTICAL DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA LOKAL DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**M. Asif Nur Fauzi**

STEBI Syaikhona Kholil Pasuruan

### **Abstract**

*The village is also known as hinterland is a support area for the city (subsidy) Potensi villages that include physical potential land element, in which the soil is an important factor for the livelihood of the villagers. The element of water is decisive for the daily interests and irrigation. Weather and climate which has led to the agrarian village. Livestock that serves as a source of animal power, a source of food and financial resources. Humans are defined as workers as processors, manufacture, and consumers. Empowerment of village governance in rural development can actually be done through two approaches, horizontal and vertical. A Horizontal approach to village government in establishing a relationship with the company is who were around to allocate the funds profit generated through corporate social responsibility programs. The program became the company's obligation to carry out development and partnership to the community so that the rural population is more dependence on grants from the central and local government. The must-have capability village officials in managing and using cooperation between villagers and companies associated with CSR programs implemented. the Vertical approach in relation to the village up effort is defined as the implementation of policies by the government to the village as management of funds from the Budget of the Village Fund (ADD) which of Local Government and Rural Funds from the State Budget. The use of these funds is already within the guidelines of each donor. One is Regulation No. 60 of 2014 it includes 3 great things namely development, community empowerment and social, development often means trivial only small-scale development such as sewer and sanitation. The actual construction if interpreted in a broad sense be performed to establish the potential of the village as scenery. It actually has a financial advantage for the village. Then the condition must be sensitive in making the Work Plan of the village. The development of tourism sector in Banyuwangi have a tremendous impact the lives and conditions of an area. However, if the potential of these developments can not be perceived by the community to the village to the politicization of the tourism sector slightly eliminate opportunities for communities in this competition. Based on the above discussion exposure can be concluded that: (1) The village government has the potential to develop its tourism not only depends on funding from the government but from the horizontal relationships that CSR of the Company around, (2) .Pengembangan*



*village can also be done through the development BUMDES, ( 3)  
Empowerment Village Government in the development of the tourism  
sector can minimize unemployment passive with creative and innovative  
industry boost*

**Keywords:** *Village Community Empowerment, Relation Relation  
Horizontal and Vertical*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Desa dengan perkembangannya bisa dilihat dengan cara yaitu membangun, membangun desa adalah merespon tiga lingkungan desa yaitu alami budaya dan sosial ekonomi dengan cara yang tepat. Perkembangan desa juga bias dirasakan adanya alat transportasi bagi masyarakat, dengan adanya alat-alat semacam itu, bias sedikit membantu suatu desa itu untuk maju, karena ditinjau dari sisi potensi fisiknya saja sudah melimpah ruah, apalagi kalau memang ciri-ciri desa itu berkembang juga baik maka sudah sepantasnyalah sumber daya manusianya juga tidak ketinggalan, karena perkembangannya suatu desa itu juga di dorong akan penduduk-penduduk yang bermukim di desa tersebut, bias penduduk desa itu melestarikan potensi yang ada maka baik lah perkembangan desa tersebut secara keseluruhan. Contohnya saja kalau dilihat di kawasan Aceh di daerah Aceh Selatan, di situ memang sudah sangat bagus sekali baik itu dari potensi fisiknya maupun non fisik, terdapatnya pohon pala, lalu siapa yang mengolah kalau bukan penduduk di sekitarnya, guna melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah di sediakan di alam khususnya di desa tersebut, sehingga maju lah suatu desa (tidak tertinggal) sesuai dengan pengetahuan dan pendidikan yang di ajarkan di setiap masing-masing desa.

Desa disebut juga sebagai *hinterland* adalah daerah pendukung bagi kota (subsidi) yaitu dimana kota mendapatkan bahan makanan banyak sebagian dari desa ke kota misalnya seperti sayuran, buah-buahan dan bahan makanan lainnya. Adapun klasifikasinya adalah : Desa sebagai pemasok bahan mentah atau bahan pangan bagi kota, Desa sebagai penyedia tenaga kerja bagi kota untuk sektor informal, dan Desa sebagai penyedia objek wisata bagi masyarakat kota untuk rekreasi. Berdasarkan



pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa memiliki potensi berkembang jika dapat dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan potensi desa yang dimiliki.

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa, potensi desa ini meliputi sumber-sumber alami dan sumber manusiawi yang tersimpan dan yang dapat diharapkan manfaatnya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa yang ada meliputi potensi fisik yaitu Unsur tanah, dimana tanah ini merupakan faktor terpenting bagi penghidupan warga desa. Unsur air yang menentukan bagi kepentingan sehari-hari dan pengairan. Cuaca dan iklim yang menjadi peranan penting bagi desa agraris. Ternak yang berfungsi sebagai sumber tenaga hewan, sumber bahan makanan dan sumber keuangan. Manusia diartikan sebagai tenaga kerja sebagai pengolah, produsen dan konsumen.

Di samping potensi fisik, potensi non fisik tidak dapat diabaikan sebagai "*the man behind the gun*". Potensi non fisik yaitu Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun. Lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam dalam arti positif. Aparatur dan pamong desa, yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya jalan roda pemerintahan desa.

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.

Upaya pemberdayaan pemerintahan desa dalam pengembangan desa sebenarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu horizontal dan vertical. Pendekatan horizontal pemerintah desa dalam menjalin relasi dengan perusahaan – perusahaan yang berada disekitar untuk mengalokasi dana untung yang didapat melalui program tanggung jawab social perusahaan. Program tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan pembangunan dan kemitraan kepada masyarakat sehingga masyarakat desa tidak lagi ketergantungan dengan dana hibah dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemampuan tersebut wajib dimiliki aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan kerjasama antara desa dan perusahaan terkait dengan program CSR yang dilaksanakan.

Pendekatan vertical dalam kaitannya dengan upaya pengembangan desa diartikan sebagai implementasi kebijakan yang diberikan pemerintah kepada desa misalnya



pengelolaan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Penggunaan dana tersebut sebenarnya sudah diatur dalam juknis dari masing-masing pemberi dana. Salah satunya adalah PP Nomor 60 Tahun 2014 hal ini mencakup 3 hal besar yakni pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan, pembangunan seringkali diartikan sepele hanya pembangunan yang berskala kecil seperti gorong-gorong maupun MCK. Sebenarnya pembangunan tersebut jika diartikan dalam arti luas bahwa pembangunan dapat dilakukan untuk membangun potensi desa seperti pariwisata. Hal tersebut sebenarnya memiliki keuntungan bagi keuangan desa. Maka kondisi tersebut harus sensitive dalam pembuatan Rencana Kerja desa.

### **Kendala - kendala dalam upaya perkembangan Desa**

Program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah :  
*Faktor Internal*

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Desa Sederhana karena SDMnya kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Desa Sederhana masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa, seperti tugas penataan pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan lain-lain. Selain aspek dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi pemerintah Desa Sederhana adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan. Kualitas aparat yang ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan, Sommeng:

“Rendahnya kualitas aparat pemerintahan desa dalam kehidupan berorganisasi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, karena rata-rata diantara mereka hanyalah tamatan SMA, tetapi untungya kepala desa memiliki andil yang sangat besar dalam pengembangan potensi yang ada di desanya”(26 Maret 2012). Faktor prasarana kerja yang juga menjadi faktor penghambat efektifnya pelaksanaan pengembangan organisasi misalnya masih terbatasnya kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh petugas khususnya yang membawahi bagian administrasi misalnya saja dalam mengantar surat penting di kantor-kantor. Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi, baik digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan secara administratif maupun untuk operasional tugas organisasi itu sendiri. Penggunaan dana khususnya bagi aparat meliputi tujuan



antara lain untuk pemberian insentif, hal ini menjadi penting sebagai alat motivasi supaya petugas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADD) yang dialokasikan bagi Kantor Desa masih minim jika dibandingkan beban tugas yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Pemerintahan Sommeng, salah satu faktor yang juga menghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Sederhana adalah sikap pemerintah desa yang terkadang lebih memilih orang lain dalam setiap proyek seperti perbaikan jalan.

#### *b. Faktor Eksternal*

##### 1. Partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam organisasi

Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memperoleh atau melaksanakan pembangunan. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah masyarakat di kawasan, masih rendah partisipasinya dalam memperoleh tujuan organisasi. Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah mendapat teguran dari aparat, hal itu bukan karena masyarakat tidak mau mengurus organisasi atau sengaja melanggar tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan organisasi. Hal itu tidak lain karena sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masih kurang.

##### 2. Hubungan antar status

Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah. Susunan status dalam satu kelompok dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu berupa status formal dan status sosial. Status formal adalah berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang ada dalam kelompok atau organisasi yang berkaitan langsung dengan rantai komando. Status sosial tidak selalu berkaitan dengan status formal seseorang, walaupun dapat saja seseorang yang mempunyai status formal yang tinggi dapat pula mempunyai status sosial yang tinggi.

Berdasarkan faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan potensi di desa tersebut dapat digambarkan secara rinci penyebab dan akibat dari beberapa faktor yang terjadi secara umum terjadi diantaranya :

##### 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya memndapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan.

##### 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima



informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat

3. Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

4. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.

5. Adat atau kebiasaan

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

6. Ketergantungan (dependence).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses "pemandirian" masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

7. Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

8. Rasa tidak percaya diri (self distrust)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

9. Rasa tidak aman dan regresi (insecurity and regression)

Keberhasilan dan "masa-masa kejayaan" yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam "kenangan" terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah : seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan



atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah, takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

10. Kesepakatan terhadap norma tertentu (conforming to norms)

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

11. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence)

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

12. Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahaan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.

13. Hal yang bersifat sakral (the sacrosanct).

Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh : di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

14. Penolakan terhadap orang luar.

Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan "terganggu" terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh "orang asing" yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

15. Kritik terhadap pemberian bantuan



Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (entry point) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan rincian penyebab terjadinya kendala di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa persoalan inti yang menjadi dasar lambannya pengembangan desa diantaranya Sikap masyarakat yang tradisional, Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing, Adat atau kebiasaan, Ketergantungan (dependence), Rasa tidak percaya diri (self distrust), Rasa tidak aman dan regresi (insecurity and regression), Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence), Kritik terhadap pemberian bantuan. Kesemua penyebab tersebut sebenarnya merupakan sumber kekuatan desa dalam perkembangannya asal diperhitungkan dan dikelola sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tepat. Sesuai dengan perkembangan kabupaten banyuwangi yang saat ini lagi booming di jawa timur. Apabila kelemahan yang terjadi tidak dikelola menjadi kekuatan yang sesuai maka sistem kebudayaan di masyarakat berangsur luntur dan peluang yang dimiliki masyarakat di desa menjadi sempit.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam perkembangan desa-desa yang dimiliki tanpa harus menghilangkan adat istiadat yang telah tumbuh berkembang di daerahnya. Kendala-kendala yang terjadi di atas sebenarnya dapat dirubah menjadi potensi yang luar biasa besar karena bersanding langsung dengan potensi yang lain seperti potensi Wisata.

Potensi wisata di kabupaten banyuwangi memiliki beragam bentuk wisata yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan pemerintah desa. Alasan pemberdayaan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengembangan wisata karena wilayah yang berdekatan sehingga konstruk masyarakat dalam proses pengembangannya lebih cepat dan mudah. Untuk mempermudah dalam pengembangan wisata yang berdekatan dengan desa maka diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur jalan menuju lokasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas dapat diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan organisasi pemerintah Desa Sederhana. Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber dari luar organisasi.

## **KAJIAN TEORI DAN METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan Desember 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh dari Studi Pustaka yang diperoleh dari website yang sesuai dengan lokasi



penelitian melalui dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman melakukan tiga tahapan yaitu reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008).

## PEMBAHASAN

### Potensi besar Pengembangan Desa dari sektor pariwisata

Kajian Kebijakan Dana Desa dari APBN menyampaikan bahwa Potensi desa juga disebut sebagai sebagai sumber daya manusia yang terdapat di desa yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian dalam usaha mengembangkan desa perlu ada:

1. Pemimpin desa yang mampu membimbing dan mengetahui besar lingkungan desa. Jadi perlu penataan / *upgrading rural leaders*. Tugas seorang pemimpin desa/kepala desa tidak hanya memanfaatkan tanah kas desa untuk dijadikan sebagai lahan meningkatkan keuangan desa melainkan seorang kepala desa seharusnya memiliki kemampuan dalam pemikiran pengembangan kinerja keuangan melalui sektor lain yang mampu meningkatkan kondisi keuangan desa yang dimasukkan kedalam rencana kerja suatu desa.
2. Aparatur desa yang memiliki tertib administrasi desa. Perlu peningkatan dalam seluk-beluk keadministrasian dan tata usaha kantor. Tugas pokok seorang aparatur desa telah diatur sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur sehingga seorang aparatur desa hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan informasi kepada kepala desa dalam hal potensi desa yang dimiliki sehingga faktor ketergantungan kepada pemerintah daerah dapat diminimalisir dan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengelola potensi tersebut dari swakarya mejadi swasembada desa.
3. Warga desa, yang dapat menyesuaikan dengan pembangunan desa dalam arti sempit dan luas. Selama ini masyarakat hanya mampu dalam pengelolaan perikanan dan persawahan, di era yang penuh dengan persaingan ini pemerintah desa hendaknya melakukan pemberdayaan masyarakat baik kepada karang taruna maupun masyarakat lain untuk dibekali bagaimana menjadi pebisnis dan tidak merasa kurang jika terjadi gagal panen disektor pertanian maupun perikanan. Pembekalan yang dapat diberikan kepada masyarakat hendaknya kemampuan soft skill agar masyarakat dapat mengembangkan diri dan ikut serta dalam upaya pengembangan desa dimana mereka dilahirkan.
4. Penataan dalam bidang usaha-usaha/menambah hasil bumi dan sebagainya perlu diadakan secara continue. Untuk kesemuanya ini unsur-unsur pimpinan desa, aparatur desa dan warga desa menentukan tingkat/stadium desa.

Berdasarkan kajian kebijakan dana desa tersebut menggambarkan bahwa desa memiliki potensi dalam pengembangan sumberdaya manusia di desa dan pembangunan desa sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014. Proses penggunaan dana desa dalam PP tersebut dikaji melalui Rencana Kerja Jangka Menengah Desa yang diharapkan dalam penyerapan dana tersebut penggunaannya dapat sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kebutuhan desa.



Pemberian dana desa dari APBN sesuai PP yang berlaku diharapkan dari tahun ketahun desa mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di kabupaten Banyuwangi isu pengembangan sektor wisata sudah menjadi isu yang booming karena secara regional kabupaten banyuwangi dikenal sebagai daerah yang memiliki peningkatan pendapatan perkapita terbesar dibandingkan daerah – daerah lain di Jawa Timur.

Kondisi tersebut seharusnya dimanfaatkan pula oleh pemerintah desa agar mampu dalam mengembangkan desanya melalui sektor pariwisata yang dimiliki agar tidak sampai wisata tersebut dimiliki oleh investor dengan kata lain peluang bisnis yang seharusnya mejadi asset desa tetapi masyarakat desa atau pemerintah desa mengabaikan dan peluang yang seharusnya besar menjajdi sempit untuk dapat diraih.

Peluang bisnis yang dapat dimiliki oleh pemerintah desa misalnya losmen atau penginapan, fasilitas umum dan parkir. Selain memberi peluang kerja kepada masyarakat sekitar pengembangan keuangan desa juga dapat diraih sehingga didalam rancangan kerja jangka menengah tersebut harus dituangkan peluang-peluang tersebut. Selain peluang bisnis peningkatan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan karena potensi pariwisata banyuwangi adalah internasional, maka diperlukan SDM yang mumpuni dari bahasa dan pengembangan diri masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk menciptakan kredibilitas pariwisata di mata wisatawan menjadi baik dan rasa memiliki masyarakat menjadi tinggi.

Tingginya rasa memiliki Masyarakat terhadap potensi wisata tersebut menumbuhkan rasa aman bagi wisatawan dan meningkatkan kredibilitas kabupaten Banyuwangi di sector pariwisata. Selain itu masyarakat juga dapat mengembangkan diri dibidang usaha inovatif kreatif yang memberikan warna dalam perkembangan pariwisata di daerahnya. Pertumbuhan industry inovatif kreatif tersebut juga bagian dari memperkenalkan tradisi dan budaya Masyarakat Banyuwangi melalui kesenian dan cinderamata bagi wisatawan baik domestic dan internasional.

### **Sinergitas Pengembangan Desa melalui sektor pariwisata melalui relation Horizontal**

CSR merupakan gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Bateman dan Snell (2008, p.205) mendefinisiakn tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif yang terjadi pada masyarakat di masa depan karena hasil kontribusi asset yang ditanggung oleh perusahaan kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang berkekurangan.



Boone dan Kurtz (2007, p.43) mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai dukungan yang diberikan oleh manajemen perusahaan agar perusahaan mampu mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengevaluasi kinerja perusahaan yaitu dengan mempertimbangkan *income statement* agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan benar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan utama masyarakat yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hartman dan DesJardins (2008, p.155) mengemukakan pendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan harus mengambil keputusan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Jika mengkaji lebih dalam terkait dengan kendala pengembangan desa bahwa ada beberapa persoalan inti yang menjadi dasar lambannya pengembangan desa diantaranya Sikap masyarakat yang tradisional, Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing, Adat atau kebiasaan, Ketergantungan (*depedence*), Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*), Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), Kritik terhadap pemberian bantuan. Kesemua penyebab tersebut sebenarnya merupakan sumber kekuatan desa dalam perkembangannya asal diperhitungkan dan dikelola sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tepat. Sesuai dengan perkembangan kabupaten banyuwangi yang saat ini lagi booming di jawa timur. Apabila kelemahan yang terjadi tidak dikelola menjadi kekuatan yang sesuai maka sistem kebudayaan di masyarakat berangsur luntur dan peluang yang dimiliki masyarakat di desa menjadi sempit.

Sempitnya peluang masyarakat dalam pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Banyuwangi saat ini desa dituntut untuk memiliki kepekaan dalam mempertahankan wisata yang berada didaerahnya. Upaya mempertahankan tersebut bukan hanya soal mempertahankan budaya atau tradisi yang ada melainkan mempertahankan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan perkapita dan seharusnya mampu memberikan efek positif terhadap kehidupan masyarakat yang berada disekitar objek wisata.

Kesempatan yang terbuka berpotensi menyemit karena kehadiran investor yang akan ikut serta dalam pengelolaan sector wisata yang ada di kabupaten tersebut. Sehingga perlu kiranya kerjasama horizontal dengan perusahaan sekitar dalam hal peningkatan kepercayaan diri masyarakat dan melatih masyarakat dalam upaya menciptakan produk kreatif inovatif dalam upaya ikut serta dalam persaingan mendapatkan peluang usaha yang terbuka dalam waktu dekat ini.

Jaminan kesediaan perusahaan dalam menyalurkan dana CSR atau pelaksanaan program yang dimiliki diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pengembangan desa dalam peningkatan keuangan dan penguatan Badan Usaha Milik desa dalam berkembang dan mampu memberikan kebanggaan kepada masyarakat.



## **Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pengentasan Pengangguran Pasif melalui peningkatan kemampuan dalam bidang bisnis kreatif**

Potensi wisata desa atau wisata di kampung-kampung cukup besar. Trennya menguat. Wisata desa ini memadukan antara keindahan alam, keberagaman budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Cocok juga untuk wisata keluarga, setiap desa yang memiliki keunikan tradisi dan keberagaman budayanya diberi ruang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Selain itu, desa yang memiliki potensi alam dan produk lokal yang khas juga turut dikembangkan.

Banyuwangi terdapat 10 desa wisata desa telah berkembang. Yaitu Desa Bangsring Wongsorejo yang mengembangkan wisata Bangsring Under Water, Desa Gombongsari Kalipuro wisata kopi dan susu kambing etawa, Desa Tamansari Licin di lereng kaki Ijen yang mengembangkan wisata belerang, Desa adat Kemiren Glagah. Juga ada Desa Sumberbuluh Songgon dengan wisata Rumah Pohon, Desa Sumberagung, Pesanggaran dengan wisata Pulau Merah dan Pantai Mustika. Desa Sarongan, Pantai Sukamade dan Rajegwesi. Desa Alian dan Alas Malang, wisata budaya kebo-keboan dan Desa Banjar, wisata sadap nira (RMOLCO, 29 Desember 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas digambarkan bahwa permasalahan pengangguran menjadi perihal yang urgen karena dapat menurunkan citra buruk sebuah daerah. Langkah dan upaya kabupaten banyuwangi dalam kaitannya percepatan perkembangan desa sangat tepat karena dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Industry kreatif merupakan hal yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia karena kaitannya dengan era Masyarakat Economic ASEAN (MEA) sehingga tuntutan memiliki masyarakat yang kreatif dalam suatu daerah sangat diperlukan.

Hal ini sinergi dengan kondisi kabupaten banyuwangi yang mengembangkan sector pariwisata untu dapat menarik minat investor baik domestic dan luar negeri untuk dapat menginvestasikan sebagian dananya untuk mengembangkan kabupaten banyuwangi. Selain itu upaya perkembangan pariwisata tidak dapat lepas dari keikutsertaan masyarakat desa karena didalam pembangunan dan pengembangan pariwisata memerlukan beberapa hal diantaranya :

1. Cinderamata
2. Budaya sebagai pelengkap wisata
3. Pernak Pernik
4. Dan Makanan Khas (Kuliner)

Beberapa hal tersebut belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah melainkan butuh ikut serta masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Masyarakat desa memiliki kekhasan masing-masing dalam sekup daerah dan kecamatan. Ke khasan tersebut dilihat dari pernak pernik yang disediakan sebagai oleh-oleh wisatawan. Sedangkan dalam hal kuliner disebuah desa dapat dijadikan sebagai icon suatu daerah ketika wisatawan mendatangi lokasi wisata tersebut.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa sebenarnya sekaligus memutus rantai pengangguran pasif yang ada disuatu desa, pengangguran tersebut bukan karena tidak memiliki keahlian melainkan kalah dalam bidang pendidikan, maka dari



itu peluang seorang pengangguran untuk memiliki penghasilan dari industri kreatif inovatif dalam melengkapi potensi wisata yang saat ini dikembangkan.

## KESIMPULAN

Pengembangan sector wisata yang ada di Banyuwangi memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan dan kondisi suatu daerah. Akan tetapi jika potensi perkembangan tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sampai dengan ke desa maka politisasi sector pariwisata sedikit menghilangkan peluang masyarakat dalam persaingan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Desa memiliki potensi mengembangkan wisatanya bukan hanya bergantung pada dana dari pemerintah melainkan dari relasi horizontal yaitu CSR dari Perusahaan sekitar
2. Pengembangan Desa juga dapat dilakukan melalui perkembangan BUMDES
3. Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pengembangan sector pariwisata dapat meminimalisir pengangguran pasif dengan dorongan industri kreatif dan inovatif

## Rekomendasi

Perlunya melakukan pemberdayaan pemerintah desa dalam upaya pengembangan sector pariwisata difungsikan sebagai berikut :

1. Penemu lokasi wisata jika didalam bahasa Jawa dikenal sebagai *sing Babat alas*
2. Desa merupakan penyedia bahan dasar terbesar untuk memenuhi kebutuhan di kota sehingga pemerintah daerah menyediakan pasar untuk bahan – bahan yang disediakan
3. Masyarakat Desa memiliki potensi budaya yang besar baik tradisi maupun adat istiadat

Masyarakat desa memiliki pengetahuan secara tradisional mengenai seluk beluk lokasi wisata yang dipeajari melalui alam maka, pemerintah daerah harus memberikan peluang agar tradisi tidak tergerus oleh datangnya investor dalam pengelolaannya

## DAFTAR PUSTAKA

Ekowati, L. (2008). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau program*. surakarta: Penerbit Pustaka Cakra.

**PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN**